

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP ASIMETRI
INFORMASI DIMODERASI OLEH *CORPORATE GOVERNANCE***

***THE EFFECT OF ACCOUNTING CONSERVATISM ON INFORMATION
ASYMMETRY MODERATED BY THE CORPORATE GOVERNANCE***

REYTHHER BIKI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP ASIMETRI
INFORMASI DIMODERASI OLEH *CORPORATE GOVERNANCE***

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Akuntansi

Disusun dan diajukan oleh

REYTHER BIKI

kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP ASIMETRI
INFORMASI DIMODERASI OLEH *CORPORATE GOVERNANCE***

Disusun dan diajukan oleh

REYTHHER BIKI
Nomor Pokok P3400210004

Menyetujui
Komisi Penasihat,

Ketua

Anggota

Dr. R. A. Damayanti, SE., M.Soc., Sc., Ak. Dr. Grace T. Pontoh, SE., M.Si., Ak.

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

nama : Reyther Biki
nomor mahasiswa : P3400210004
program studi : Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2013

Yang menyatakan,

Reyther Biki

PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga proses penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasullullah Muhammad SAW, Nabi akhirul zaman yang membawa perubahan peradapan dunia berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Gagasan yang melatari tajuk permasalahan ini timbul dari berbagai hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pentingnya peranan konservatisme akuntansi dalam menurunkan tingkat asimetri informasi. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk membuktikan secara empiris tentang praktek konservatisme di Indonesia pada perusahaan manufaktur yang dapat menurunkan tingkat asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

Banyak kendala yang peneliti hadapi dalam penyusunan tesis ini, yang hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini peneliti dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada.

1. Dr. R.A. Damayanti, SE., M.Soc., Sc., Ak. sebagai Ketua Komisi Penasihat/Penguji dan Dr. Grace T. Pontoh, SE., M.Si. Ak. sebagai Anggota Komisi Penasihat/Penguji atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mulai dari pengembangan permasalahan penelitian sampai dengan penyelesaian tesis ini.

2. Anggota Dewan Penguji yang terdiri dari: Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak., Dr. Alimuddin, SE. MM. Ak., serta Dr. Tawakkal, SE., M.Si., yang telah memberikan usulan, saran dan kritik untuk kesempurnaan penulisan tesis.
3. Prof. Dr. Gagaring Pagalung, SE., MS., Ak. selaku Ketua Program Studi Magister Sains Akuntansi Universitas Hasanuddin dan stafnya yang telah membantu segala keperluan administrasi penyusunan tesis.
4. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Program Magister Sains Akuntansi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berharga dalam membantu penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Gaffar La Tjokke, M.Si. selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberikan rekomendasi kepada peneliti untuk melanjutkan studi di Program Magister Sains Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
6. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hamzah Biki dan Ibunda Rina Hasan (almh) yang dengan tulus ikhlas mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Istri dan anakku tercinta Fathrisya Biki yang dengan tulus ikhlas mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti.

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Sains Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar angkatan 2010 yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam proses perkuliahan.
9. Kepada berbagai pihak yang namanya tidak dapat peneliti cantumkan tetapi telah banyak membantu peneliti dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak dan Ibu sekalian atas segala bantuan dan partisipasinya yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini amin.

Makassar, Juli 2013

Reyther Biki

ABSTRAK

REYTHHER BIKI. *Pengaruh Konservatisme Akuntansi terhadap Asimetri Informasi dimoderasi oleh Corporate Governance* (dibimbing oleh R.A. Damayanti dan Grace T. Pontoh)

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh (1) konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi, (2) kepemilikan manajerial terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi, (3) kepemilikan institusional terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi, (4) komisaris independen terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi, (5) komite audit independen terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan menghasilkan 87 data observasi tahun 2009-2011. Data dianalisis dengan menggunakan teknik *moderated regression analysis* (MRA)

Hasil penelitian membuktikan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap asimetri informasi. Variabel kontrol *price* dan *size* berpengaruh negatif terhadap asimetri informasi. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. Hasil ini mendukung sepenuhnya teori agensi. Prinsipal dengan kepemilikan saham yang tinggi memiliki hak kontrol atas manajer agar tidak bersikap oportunistik. Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit independen tidak mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.

Kata kunci: asimetri informasi, konservatisme akuntansi, *corporate governance*

ABSTRACT

REYTHHER BIKI. *The Effect of Accounting Conservatism on Information Asymmetry moderated by the Corporate Governance* (supervised by RA Damayanti and Grace T. Pontoh).

This research aimed to examine the effect of (1) the accounting conservatism on information asymmetry, (2) managerial ownership on accounting conservatism relationship with information asymmetry, (3) institutional ownership on accounting conservatism relationship with information asymmetry, (4) independent directors on accounting conservatism relationship with information asymmetry, (5) the audit committee are independent of accounting conservatism relationship with information asymmetry.

This research was conducted on manufacturing firm on the Indonesian Stock Exchange (IDX). The data used secondary data in this research. Samples were taken by purposive sampling technique and generate 87 observations for 3 years (2009-2011). The data were analyzed by using moderated regression analysis (MRA).

The research result indicates that the accounting conservatism does not affect the information asymmetry. Control variable; price and size negatively related to information asymmetry. Institutional ownership is able to moderate the relationship between accounting conservatism with information asymmetry. These results fully support the agency theory. Principals with high stock ownership has the right of control over managers not to be opportunistic. Managerial ownership, independent directors and independent audit committee are not able to moderate the relationship between accounting conservatism with information asymmetry.

Keyword: *information asymmetry, accounting conservatism, corporate governance*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	21
D. Manfaat Penelitian	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	23
2. Konservatisme Akuntansi	26
3. Kontroversi Konservatisme Akuntansi	28
4. Manfaat Konservatisme Akuntansi	31
5. Pengukuran Konservatisme Akuntansi.....	34
6. Asimetri Informasi.....	36
a. <i>Adverse selection</i>	37
b. <i>Moral hazard</i>	38
7. <i>Bid-Ask Spread</i>	39

8. <i>Corporate Governance</i>	42
a. Pengertian <i>corporate governance</i>	42
b. <i>Corporate governance</i> dan perspektif agensi.	45
c. Mekanisme <i>corporate governance</i>	47
B. Kerangka Konseptual.....	55
C. Hipotesis	58
D. Model Penelitian	68
BAB III. METODE PENELITIAN.....	69
A. Rancangan Penelitian.....	69
B. Lokasi dan Waktu	70
C. Populasi dan Sampel	70
D. Teknik Pengumpulan Data.....	71
E. Definisi Operasional.....	72
F. Teknik Analisis.....	79
1. Statistik Deskriptif	79
2. Uji Asumsi Klasik.....	79
3. Pengujian Hipotesis.....	81
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	86
A. Deskriptif Objek Penelitian.....	86
B. Analisis Deskriptif Statistik	87
C. Uji Asumsi Klasik	91
1. Uji Asumsi Klasik Persamaan 1	92
2. Uji Asumsi Klasik Persamaan 2	95
D. Hasil Penelitian	97
E. Pembahasan.....	106
1. Konservatisme Akuntansi berpengaruh terhadap Asimetri Informasi.....	106
2. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan Asimetri Informasi.....	110
3. Kepemilikan Institusional berpengaruh	

terhadap hubungan Konservatisme Akuntansi dengan Asimetri Informasi.....	113
4. Komisaris Independen berpengaruh terhadap hubungan Konservatisme Akuntansi dengan Asimetri Informasi.....	118
5. Komite Audit Independen berpengaruh terhadap hubungan Konservatisme Akuntansi dengan Asimetri Informasi.....	121
BAB V. PENUTUP	125
A. Kesimpulan	125
B. Implikasi Penelitian	128
C. Keterbatasan Penelitian.....	129
D. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. Perhitungan jumlah sampel penelitian	86
2. Analisis deskriptif statistik variabel penelitian	87

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Konseptual	57
2. Model Penelitian	68

DAFTAR LAMPIRAN

nomor	halaman
1. Review penelitian terdahulu	137
2. Daftar nama perusahaan sampel	143
3. Pengujian awal asumsi heteroskedastisitas persamaan 1: grafik scatterplot	144
4. Pengujian asumsi normalitas persamaan 1: grafik histogram	144
5. Pengujian asumsi normalitas persamaan 1: grafik normal P-P plot residual	144
6. Pengujian asumsi normalitas persamaan 1: kolmogorov smirnov	145
7. Pengujian asumsi multikolinieritas persamaan 1: tolerance dan variance inflation factor (VIF)	145
8. Pengujian asumsi heteroskedastisitas persamaan 1: grafik scatterplot	145
9. Pengujian awal asumsi heteroskedastisitas persamaan 2: grafik scatterplot	146
10. Pengujian asumsi normalitas persamaan 2: grafik histogram	146
11. Pengujian asumsi normalitas persamaan 2: grafik normal P-P plot residual	146
12. Pengujian asumsi normalitas persamaan 2: kolmogorov smirnov	147
13. Pengujian asumsi multikolinieritas persamaan 2: tolerance dan variance inflation factor (VIF)	147
14. Pengujian asumsi heteroskedastisitas persamaan 2: grafik scatterplot	148
15. Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) persamaan 1	148
16. Pengujian ketepatan model (<i>goodness of fit test</i>) persamaan 1	148
17. Pengujian hipotesis secara parsial (uji T) persamaan 1	149

18.	Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) persamaan 2	149
19.	Pengujian ketepatan model (<i>goodness of fit test</i>) persamaan 2	149
20.	Pengujian hipotesis secara parsial (uji T) persamaan 2	150
21.	Tabel perhitungan konservatisme akuntansi	151
22.	Tabel olahan variabel penelitian sebelum transformasi	154
23.	Tabel olahan variabel penelitian setelah transformasi	158
24.	Tabel statistik praktek <i>overstated</i> laba	162
25.	Tabel statistik praktek konservatisme akuntansi	166

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perusahaan berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan transparan. Penyusunan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan investasi (PSAK 2012).

Pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan masyarakat). Para pengguna internal (para manajemen) lebih mengetahui peristiwa yang terjadi dalam perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang berada di luar perusahaan kurang mengetahui informasi tersebut. Kurangnya informasi akan mengakibatkan timbulnya asimetri informasi antara pemegang saham, (*principal*) dan kreditor dalam menilai kualitas laporan keuangan yang dihasilkan manajer (*agen*) dalam rangka pengambilan keputusan investasi.

Asimetri informasi merupakan fenomena yang sering terjadi di lingkungan bisnis saat ini. Kasus mengejutkan beberapa tahun terakhir ialah kasus skandal manipulasi laporan keuangan *overstated* yang dilakukan oleh perusahaan besar di Amerika Serikat, di antaranya adalah

Enron, Merck, dan WorldCom (Cornett *et al.*, 2006). Kasus Enron misalnya, satu dampak yang sangat jelas, yaitu kerugian yang ditanggung para investor dari ambruknya nilai saham yang sangat dramatis dari harga per saham US\$ 30 menjadi hanya US\$ 10 dalam waktu dua minggu. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa suatu perusahaan kelas dunia dapat mengalami hal yang sangat tragis dengan mendeklarasikan bangkrut justru setelah hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut dinyatakan “wajar tanpa syarat” (Alijoyo dan Zaini, 2003). Kasus yang sama terjadi pada beberapa perusahaan di Indonesia, seperti PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk, yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi penyajian aktiva yang *overstated* dalam laporan keuangan (Gideon, 2005).

Kegiatan manipulasi laporan keuangan disebabkan adanya asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan dengan informasi laporan keuangan tersebut. Apabila informasi yang diserap publik merupakan informasi yang telah dimanipulasi, maka akan terjadi asimetri informasi antara informasi yang dimiliki pihak yang memanipulasi informasi dengan informasi yang dimiliki publik. Akibat yang ditimbulkan dari asimetri informasi yaitu hilangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga akan menurunkan nilai perusahaan dan harga saham.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan yang terbentuk karena pihak manajemen (agen) memiliki informasi lebih banyak dibandingkan

dengan pihak investor (prinsipal). Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (*shareholders*). Sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan informasi akuntansi yang dapat diandalkan. Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (*shareholders*).

Scott (2003) menyatakan bahwa asimetri informasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk di antaranya *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah suatu pihak atau lebih ketika melangsungkan transaksi memiliki informasi lebih atas pihak lainnya, sedangkan *moral hazard* adalah suatu pihak atau lebih yang melakukan transaksi dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut dibandingkan pihak lain.

Asimetri informasi antara manajer dan investor memungkinkan manajer menggunakan *private information* dengan jalan membesar-besarkan (*overstatement*) kinerja keuangan dalam laporan keuangan, sehingga harga saham perusahaan juga ikut naik selama mereka mengelola perusahaan (Lafond dan Watts, 2006). Peningkatan harga saham akan memberikan keuntungan bagi manajer, karena semakin besar pendapatan dari penjualan saham akan meningkatkan penerimaan

insentif dan bonus bagi manajer dari hasil penjualan saham. Manipulasi laporan keuangan akan menguntungkan manajer, tetapi justru sebaliknya menimbulkan kerugian bagi investor karena investor telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli saham namun mereka tidak mendapatkan keuntungan seperti yang mereka harapkan karena laba yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah kas perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan dalam teori agensi bahwa hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih individu (*principal*) mempekerjakan individu lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan kekuasaan kepada agen untuk membuat suatu keputusan atas nama prinsipal tersebut. Teori agensi menjelaskan bahwa asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik, yaitu manipulasi laporan keuangan, dengan tujuan untuk memperlihatkan kinerja yang tinggi karena mengharapkan bonus dan insentif. Manipulasi terhadap laporan keuangan merupakan penyebab adanya asimetri informasi. Manipulasi yang paling sering dilakukan adalah dalam bentuk *overstated* laba. Laba merupakan informasi penting mengenai gambaran kinerja perusahaan dan menjadi perhatian para pengguna laporan keuangan dalam menilai perusahaan (Haniati dan Fitriany, 2010). Selain itu, kinerja operasional perusahaan juga berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Kesempatan untuk memilih beberapa metode akuntansi membuka peluang bagi manajer melakukan manipulasi laporan keuangan.

Asimetri informasi menjadi tema yang menarik di lingkungan bisnis saat ini. Informasi yang diserap oleh publik terkadang sulit untuk dipahami keandalan dan keakuratan informasi tersebut. Kebutuhan akan informasi semakin meningkat seiring dengan kebutuhan publik dalam menilai risiko dan peluang bisnis di pasar modal. Telaah mengenai asimetri informasi sangat penting terutama faktor-faktor yang dapat memengaruhinya, sehingga orang dapat menilai kualitas informasi yang diterima dengan melihat faktor-faktor yang memengaruhinya tersebut.

Salah satu faktor yang dapat mengurangi tingkat asimetri informasi antara manajer dan investor adalah dengan memilih prinsip akuntansi konservatisme. Penerapan prinsip ini akan menimbulkan penilaian terhadap pendapatan cenderung rendah, dan biaya cenderung tinggi. Akibatnya, laporan keuangan akan menghasilkan laba yang rendah (*understatement*). Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya (Juanda, 2007).

Penman dan Zhang (2002) mendefinisikan konservatisme sebagai suatu pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku dari *net assets* relatif rendah. Sementara, Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba dalam merespon berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespon berita baik (*good news*). Hal senada juga diungkapkan Givoly dan Hayn (2000) yang mengartikan konservatisme sebagai prinsip mempercepat pengakuan

biaya dan rugi, serta menunda pengakuan pendapatan dan keuntungan, sehingga laporan keuangan yang akan dihasilkan dari prinsip konservatisme merupakan laporan keuangan yang *understated*. Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Selanjutnya, Watts juga menjelaskan bahwa konservatisme akuntansi muncul dari insentif yang berkaitan dengan biaya kontrak, litigasi, biaya pajak, dan biaya politik yang bermanfaat bagi perusahaan untuk mengurangi biaya agensi serta mengurangi pembayaran yang berlebihan kepada manajer, pemegang saham, pengadilan dan pemerintah.

Penggunaan prinsip konservatisme dalam perusahaan didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi di masa mendatang, sehingga pengukuran dan pengakuan untuk angka-angka tersebut dilakukan dengan hati-hati dan akuntabel. Almilia (2004) menjelaskan bahwa konservatisme merupakan reaksi untuk berhati-hati atas ketidakpastian agar ketidakpastian dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis dapat dipertimbangkan dengan cukup memadai.

Hendriksen dan Van Breda (2000) menjelaskan ketidakpastian dalam akuntansi timbul dari dua sumber. Pertama, berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan di masa datang yang seringkali membuat

alokasi antara masa lalu dan sekarang, asumsi dibuat mengenai logika alokasi berdasarkan harapan masa datang. Meskipun beberapa asumsi dan harapan mengenai alokasi ini bisa disahkan di periode mendatang, namun banyak alokasi tidak pernah dapat diuji secara lengkap. Kedua, pengukuran akuntansi seringkali diasumsikan merupakan pernyataan moneter mengenai kekayaan yang mensyaratkan taksiran jumlah masa datang yang tidak pasti. Adapun risiko yang dihadapi perusahaan diantaranya adalah risiko litigasi yaitu risiko yang berpotensi menimbulkan biaya yang tidak sedikit karena berurusan dengan masalah hukum. Secara rasional manajer akan menghindari kerugian akibat litigasi tersebut dengan cara melaporkan keuangan secara konservatif, karena laba yang terlalu tinggi memiliki potensi risiko litigasi lebih tinggi.

Hendriksen dan Van Breda (2000) menjelaskan ada dua argumen yang dipakai untuk mendukung konservatisme dalam menghadapi ketidakpastian. Pertama, sikap pesimistik dianggap perlu untuk menetralkan sikap optimistik berlebihan yang ada pada para manajer dan pemilik. Para pengusaha mempunyai kecenderungan bersikap optimistik tentang perusahaan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa mereka juga akan menerapkan sikap tersebut dalam memilih prinsip dan metode akuntansi untuk melaporkan informasi laporan keuangan. Adanya desakan dari pihak kreditor, maka para akuntan akan selalu menunjukkan sikap konservatif. Sikap ini terus dianut dan memberikan warna dalam praktik akuntansi masa kini. Kedua, *overstatement* laba dan aset jauh

lebih berbahaya daripada *understatement*. Di sini ada anggapan bahwa konsekuensi karena kesalahan memperkirakan keuntungan berakibat lebih serius daripada konsekuensi karena kesalahan memperkirakan kerugian atau kebangkrutan. Oleh karenanya, para akuntan memerlukan verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui pendapatan yang mungkin timbul dibandingkan mengakui biaya yang mungkin timbul.

Prinsip konservatisme akuntansi di kalangan para peneliti masih dianggap sebagai prinsip yang kontroversial. Di satu sisi, konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Prinsip ini mengakibatkan laporan keuangan menjadi bias sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi risiko perusahaan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Penman dan Zhang (2002) bahwa konservatisme menghasilkan kualitas laba yang rendah dan kurang relevan karena prinsip ini akan cenderung mengurangi laba. Monahan (1999) menyatakan bahwa semakin tinggi konservatisme maka nilai buku yang dilaporkan akan semakin bias. Di sisi lain, konservatisme akuntansi bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watts, 2003). Konservatisme dapat mengatasi masalah yang timbul akibat asimetri informasi antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*), di antaranya *overstatement* laporan keuangan dan munculnya *agency cost*.

Konservatisme akuntansi memiliki peranan dalam teori agensi untuk penentuan praktik yang paling efisien yang dapat membatasi konflik atau masalah agensi. Praktik dalam perusahaan ternyata menunjukkan agen cenderung untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena munculnya asimetri informasi antara agen dan pemegang saham, sehingga agen berpeluang untuk melaksanakan praktik ini dengan cara memanipulasi laporan keuangan. Konservatisme akuntansi dapat berperan dalam teori agensi untuk mencegah adanya asimetri informasi dengan cara membatasi agen dalam melakukan praktik manipulasi laporan keuangan.

Lafond dan Watts (2006) berpendapat bahwa laporan keuangan yang mengaplikasikan prinsip konservatisme dapat mengurangi kemungkinan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan serta mengurangi *deadweight loss* (biaya agensi) yang muncul sebagai akibat dari asimetri informasi. Chi dan Wang (2010) menemukan bukti bahwa konservatisme akuntansi secara positif berkaitan dengan tingkat dan perubahan asimetri informasi. Konservatisme adalah cara yang efisien untuk mengatasi masalah *moral hazard* yang timbul dari informasi yang asimetris antara *stakeholder* yang berkepentingan.

Dalam mekanisme perdagangan saham di pasar modal para pelaku pasar modal juga menghadapi masalah agensi. Partisipan di pasar modal saling berinteraksi guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritas. Aktifitas yang mereka lakukan dipengaruhi oleh

informasi yang diterima baik secara langsung, maupun tidak langsung (*insider trading*). Biasanya *dealers* memiliki informasi terbatas mengenai perusahaan dan cenderung menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan pedagang terinformasi (*informed traders*). Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong *dealers* untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid (Komalasari, 2001).

Penelitian tentang konservatisme akuntansi, dan asimetri informasi di Indonesia belum banyak dilakukan, serta menghasilkan penelitian yang masih beragam. Hal ini dapat dibuktikan oleh Haniati dan Fitriany (2010) yang mengatakan bahwa semakin tinggi konservatisme akan menyebabkan tingkat asimetri informasi yang semakin rendah antara manajer dan investor. Penelitian ini mendukung penelitian Lafond dan Watts (2006) yang menjelaskan bahwa konservatisme mengurangi asimetri informasi dengan cara memberikan batasan kepada manajemen dalam menggunakan informasi yang mereka miliki. Ruwanti (2011) justru menunjukkan hasil penelitian yang berbeda yaitu tidak ada pengaruh konservatisme akuntansi pada asimetri informasi. Hal ini berarti bahwa tindakan perusahaan untuk bersikap konservatif tidak memengaruhi perilaku investor atas investasinya. Selain itu juga, kemungkinan disebabkan karena investor mempertimbangkan variabel-variabel lain atas tindakan investasinya.

Adanya hasil penelitian yang berbeda di kalangan para peneliti yang berkaitan dengan penerapan konservatisme akuntansi, maka dalam penelitian ini memasukkan variabel yang terkandung dalam *corporate governance* untuk memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. Penulis menduga bahwa ada variabel lain yang menginteraksi hubungan konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi.

Corporate governance adalah serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investors/minority shareholders*) dari ekspropriasi¹ yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme utama *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outside investors*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

Kanagaretnam *et al.* (2007) menyatakan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat menurunkan tingkat asimetri informasi. Mekanisme tersebut adalah proporsi komisaris independen, proporsi komite audit independen, jumlah *meeting* komite audit, jumlah *meeting* dewan komisaris, proporsi kepemilikan manajer, dan karyawan. Wardhani (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit

¹ Ekspropriasi (*expropriation*) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens *et al.*, 2000)

mendorong penggunaan konservatime akuntansi dengan metode akrual. Jensen dan Meckling (2007) menyatakan kepemilikan saham manajemen akan menurunkan permasalahan agensi. Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan semakin rendah kepemilikan manajerial, maka permintaan ditetapkan akuntansi konservatif semakin tinggi. Ahmed dan Duellman (2007) menyatakan *board of directors* yang didominasi pihak internal akan memberikan kesempatan bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para peneliti tersebut, maka penelitian ini menggunakan empat unsur pengukuran yang terkandung dalam *corporate governance*, yaitu; proporsi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen dan proporsi komite audit. Pengukuran empat unsur *corporate governance* dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap konservatisme dan asimetri informasi.

Manajer cenderung menjadi sumber informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini ataupun masa yang akan datang. Keterbatasan pandangan serta keterbatasan tanggung jawab manajer menyebabkan timbulnya masalah keagenan antara manajer dan pemegang saham. Keterbatasan tersebut memberikan dorongan bagi manajer untuk melaporkan laba dan aktiva yang *overstated*, sehingga menciptakan biaya agensi. Biaya agensi timbul karena usaha manajer untuk memindahkan kekayaan perusahaan pada dirinya dan mengabaikan peran utamanya,

yaitu mengatur perusahaan secara efektif serta menciptakan nilai bagi pemegang saham (Lafond dan Roychowdhury, 2007).

Kecenderungan manajer melakukan *overstated* adalah untuk memaksimalkan kepentingannya ketika kepemilikan saham manajer rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan akuntansi yang lebih konservatif. Hasil penelitian Lafond dan Roychowdhury (2007) menyatakan bahwa semakin rendah kepemilikan manajerial maka permintaan ditetapkannya akuntansi konservatis akan semakin tinggi, yang diakibatkan munculnya permasalahan agensi. Kepemilikan saham manajerial sebagai mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk meminimalkan permasalahan dalam teori agensi akibat adanya asimetri informasi. Fungsi ini dipandang mampu memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dan asimetri informasi. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi, maka pemegang saham institusional dapat menggantikan atau memperkuat fungsi *monitoring* dari dewan komisaris dalam perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007), sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan secara tidak langsung dapat menuntut adanya informasi

yang transparan dari pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional ini, maka semakin besar pula *monitoring* yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya informasi yang transparan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk menetapkan prinsip akuntansi yang konservatif. Cornett *et al.* (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam rangka meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan.

Komposisi dewan komisaris independen yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan memengaruhi tindakan manajer untuk melakukan kecurangan dengan cara membesar-besarkan laba dan memanipulasi laba (Gideon, 2005). Zehnder dikutip dalam *booklet* Forum *Corporate Governance* Indonesia atau FCGI (2001) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam

menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif *monitoring* yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Komite audit independen bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit independen dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan

perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan komite audit independen ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme, sehingga dapat mengurangi tingkat asimetri informasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi dimoderasi oleh *corporate governance*. *Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit independen digunakan untuk menguji: 1) pengaruh kepemilikan manajerial terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi; 2) pengaruh kepemilikan institusional terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi; 3) pengaruh komisaris independen terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi; 4) pengaruh komite audit independen terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.

Penelitian ini juga diharapkan memberikan bukti empiris mengenai praktek konservatisme akuntansi di Indonesia yang bermanfaat dalam mengurangi asimetri informasi sebagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak terakomodasinya praktek

konservatisme akuntansi dalam adopsi *International Financial Reporting Standard* (IFRS) di Indonesia tahun 2012 mengindikasikan adanya kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya prinsip *fair value* yang tidak sejalan dengan prinsip konservatisme yang menggunakan *historical cost*. Hellman (2007) menyatakan bahwa meskipun prinsip konservatisme tidak lagi dimasukkan dalam kerangka konseptual IFRS, namun konservatisme tetap ada dalam IFRS. Beberapa celah yang memungkinkan praktek konservatisme diterapkan dalam IFRS yaitu kompensasi kerugian yang menyebabkan pengakuan piutang pajak tangguhan dan kapitalisasi biaya pengembangan yang menyebabkan efek cadangan tersembunyi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Haniati dan Fitriany (2010). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan menggunakan tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua tahun pengamatan (tahun 2007 sampai dengan tahun 2008). Penggunaan tiga tahun pengamatan dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih akurat dari penelitian sebelumnya tentang praktek konservatisme di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan variabel *corporate governance* untuk moderasi yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit independen. Alasan menggunakan variabel *corporate governance* dalam penelitian ini

disebabkan karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniati dan Fitriany (2010) cenderung menghasilkan tingkat R^2 yang rendah, hal ini mengindikasikan bahwa ada variabel lain yang turut memengaruhi asimetri informasi selain dari konservatisme akuntansi.

Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu *price* dan *size* perusahaan. Penggunaan variabel kontrol dimaksudkan untuk mengendalikan variabel dependen, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat signifikansi variabel independen dan memperkecil *error term*. Venkatesh dan Chiang (1986) dalam Kanagaretnam *et al.* (2007) menjelaskan bahwa harga saham mempunyai hubungan negatif dengan perubahan asimetri informasi, karena asimetri informasi yang tinggi dapat menurunkan harga saham. Kanagaretnam *et al.* (2007) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara *size* dengan *change spread*. Ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dengan volume perdagangan, sedangkan volume perdagangan berhubungan negatif dengan *spread*. Hal ini karena perusahaan yang besar cenderung memiliki volume perdagangan yang tinggi, sehingga kemungkinan terjadi asimetri informasi akan semakin kecil.

B. Rumusan Masalah

Asimetri informasi merupakan kondisi di mana pihak manajemen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan investor. Kondisi ini dimanfaatkan manajer untuk melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan dalam bentuk *overstates* laba dan aktiva. Kasus

manipulasi dapat menyebabkan kurangnya kepercayaan investor terhadap perusahaan yang pada akhirnya dapat menurunkan nilai perusahaan dan harga saham.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam teori agensi bahwa antara prinsipal dan agen menginginkan adanya keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari risiko yang mungkin terjadi. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan terjadinya konflik agensi di mana manajer akan mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham (Weston dan Brigham, 1990). Hal senada juga dikemukakan oleh Lafond dan Watts (2006) bahwa asimetri informasi memungkinkan manajer menggunakan *private information* dengan jalan membesar-besarkan laba (*overstatement*) sehingga harga saham juga ikut naik selama mereka mengelola perusahaan.

Salah satu cara untuk mengurangi *overstated* laba dan aktiva yang ditimbulkan oleh asimetri informasi adalah dengan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Penerapan prinsip ini menghasilkan penilaian terhadap pendapatan yang cenderung rendah dan biaya cenderung tinggi akibatnya laba yang dihasilkan rendah. Pencatatan laba yang rendah akibat prinsip konservatisme bermanfaat untuk menekan perilaku manajer yang cenderung oportunistik dan pesimistik dalam penyajian laporan keuangan. Manfaat lain yang ditimbulkan dari penerapan prinsip ini yaitu

adanya cadangan dana tersembunyi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aktiva, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada pihak luar.

Penerapan prinsip ini masih menimbulkan pro dan kontra di kalangan para peneliti. Konservatisme dianggap suatu kendala yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan karena menghasilkan laba yang rendah (Penman dan Zhang, 2002). Monahan (1999) menyatakan konservatisme akan mengakibatkan nilai buku aktiva menjadi bias. Di sisi lain konservatisme bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak (Watt, 2003). Lafond dan Watts (2006) berpendapat bahwa konservatisme mengurangi manipulasi laporan keuangan serta mengurangi *deadweight loss* (biaya agensi) karena adanya asimetri informasi. Chi dan Wang (2010) menemukan bukti bahwa konservatisme berkaitan dengan perubahan asimetri informasi dan merupakan cara yang efisien untuk mengurangi masalah *moral hazard*.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten, maka penelitian ini memasukkan variabel yang terkandung dalam *corporate governance* untuk memoderasi hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi. *Corporate governance* adalah serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan para manajer dan pemegang saham pengendali.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap asimetri informasi?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi?
5. Apakah komite audit independen berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai berikut ini.

1. Pengaruh konservatisme akuntansi terhadap asimetri informasi,
2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi,
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi,
4. Pengaruh komisaris independen terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi,

5. Pengaruh komite audit independen terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat, yaitu berikut ini.

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan sejauh mana keefektifan konservatisme akuntansi yang dimoderasi oleh *corporate governance* dalam mengurangi tingkat asimetri informasi. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang pengembangan akuntansi keuangan di Indonesia khususnya tentang praktek konservatisme akuntansi dalam hubungannya dengan asimetri informasi.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi manajer dan investor tentang pengaruh konservatisme dalam mengurangi asimetri informasi.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan kontribusi bagi para regulator di bidang akuntansi keuangan dalam menentukan kebijakan tentang prinsip konservatisme akuntansi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang digunakan perusahaan dalam mendasari praktik bisnisnya. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi disebut juga sebagai teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan. Mereka juga menyatakan bahwa hubungan agensi adalah sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang mempekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa bagi kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan, dan pengambilan keputusan kepada pihak lain. Dengan demikian, teori ini mengindikasikan adanya kepentingan pada setiap pihak yang ada di perusahaan untuk mencapai tujuan.

Pihak yang berkepentingan tersebut adalah pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer perusahaan sebagai agen. Agen harus melakukan tugas yang diberikan oleh prinsipal sebagai tanggung jawab jasa. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian uang yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan, agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi

keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan agensi.

Kedua pihak dalam teori agensi tersebut menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka juga berusaha menghindari risiko yang mungkin terjadi. Adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak dapat menyebabkan terjadinya konflik agensi. Manajer akan mengambil keputusan dan kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham, yang semestinya hal itu tidak sesuai dengan tujuan utama manajer yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham yang akan diwujudkan melalui pemaksimalan harga saham biasa (Weston dan Brigham, 1990).

Konflik agensi lainnya yang mungkin terjadi yaitu mengenai asimetri informasi. Asimetri informasi timbul karena kurang lengkapnya informasi yang diperoleh, atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang diketahui oleh pihak lainnya. Misalnya, manajer mungkin memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemegang saham karena manajer adalah pihak yang lebih sering berhadapan dengan kegiatan operasional di perusahaan. Dengan demikian, pemegang saham yang hanya memiliki sedikit informasi akan kesulitan dalam mengontrol perusahaan yang dijalankan oleh manajer.

Terkait dengan asimetri informasi Jensen dan Meckling (1976) dalam Lafond dan Watts (2006) menjelaskan bahwa semakin tinggi asimetri informasi antara manajer dan investor, maka akan memperbesar

kesempatan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan dalam bentuk *overstated* laba. Manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajer tersebut dilandasi oleh adanya rencana bonus dan insentif yang akan diberikan investor kepada manajer karena di anggap kinerjanya baik. Berdasarkan asumsi tersebut, maka manajer akan menerapkan prinsip akuntansi konvensional yang lebih liberal.

Selain itu, efek dari asimetri informasi dalam bentuk *overstated* laba akan menimbulkan biaya agensi yang kemudian dapat menimbulkan *expected cash flow* perusahaan (Watts, 2003 dalam Lafond dan Watts, 2006). Biaya agensi adalah biaya yang dikeluarkan oleh investor untuk mencegah atau meminimalisir masalah agensi dalam perusahaan, agar memberikan kontribusi guna memaksimalkan kekayaan pemilik dan untuk memonitor perilaku manajer. Semakin tinggi asimetri informasi, semakin besar peluang manajer untuk memanipulasi laporan keuangan, oleh sebab itu, semakin besar kesempatan manipulasi yang dilakukan manajer, maka akan semakin besar juga biaya agensi yang harus di tanggung oleh investor.

Untuk mengatasi perilaku manajer tersebut maka investor cenderung menginginkan agar manajer menerapkan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Prinsip ini di harapkan dapat meminimalisir perilaku yang oportunistik dari manajer dalam melaporkan laba yang *overstated* karena pada dasarnya prinsip konservatisme akuntansi cenderung menghasilkan laba yang rendah. Konservatisme menerapkan tingkat verifikasi yang

tinggi sehingga laba yang dihasilkan adalah merupakan laba yang berkualitas.

2. Konservatisme Akuntansi

Konservatisme merupakan reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan, serta memastikan bahwa ketidakpastian, dan resiko inheren dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aktiva. Konsep konservatisme menyatakan bahwa dalam keadaan yang tidak pasti, manajer perusahaan akan menentukan pilihan perlakuan atau tindakan akuntansi yang di dasarkan pada keadaan, harapan, kejadian, atau hasil yang dianggap kurang menguntungkan (Dewi, 2004).

Watts (2003) mendefinisikan konservatisme sebagai prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba, serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan akan terjadi. Penerapan prinsip ini mengakibatkan pilihan metode akuntansi ditujukan pada metode yang melaporkan laba atau aktiva lebih rendah serta melaporkan hutang lebih tinggi. Dengan demikian, pemberi pinjaman akan menerima perlindungan atas resiko menurun (*downside risk*) dari neraca yang menyajikan aset bersih *understatement* dan laporan keuangan yang melaporkan berita buruk secara tepat waktu. Givoly dan Hayn (2000)

mendefinisikan konservatisme sebagai pengakuan awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan dan keuntungan.

Konservatisme akuntansi merupakan suatu pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang menjaga nilai buku dari *net assets* relatif rendah (Penman dan Zhang, 2002). Penggunaan metode LIFO (*Last In First Out*) dalam menilai persediaan di saat nilai persediaan meningkat adalah salah satu contoh penerapan akuntansi konservatisme. LIFO dikatakan lebih konservatif karena metode LIFO mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah dibandingkan dengan FIFO dan *average cost method* pada saat nilai persediaan mengalami peningkatan. Memilih untuk membebankan sekaligus pengeluaran *Research and Development* (R&D) daripada mengkapitalisasikan pengeluaran R&D sebagai aset dan kemudian diamortisasi merupakan contoh lain dari penerapan metode konservatisme. Pemilihan metode depresiasi yang secara konsisten menggunakan estimasi umur aset yang pendek juga mengindikasikan penerapan konservatisme dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, perusahaan membebankan depresiasi atau penyusutan melebihi *economic depreciation*, sehingga nilai aset yang disusutkan relatif lebih rendah dari seharusnya. Hal ini yang menyebabkan metode penyusutan seperti ini juga mengindikasikan konservatisme. Contoh lain dari penerapan konservatisme adalah menggunakan akun *allowances for doubtful accounts, sales returns and warranty liabilities*.

Basu (1997) mendefinisikan konservatisme sebagai praktik mengurangi laba (mengecilkan aktiva bersih) dalam merespons berita buruk (*bad news*), tetapi tidak meningkatkan laba (meninggikan aktiva bersih) dalam merespons berita baik (*good news*). Feltham dan Ohlson (1995) dalam Penman dan Zhang (2002) menyatakan karakteristik konservatisme adalah *net assets* yang dilaporkan dalam laporan keuangan lebih rendah dibandingkan nilai pasarnya dalam jangka panjang. Beaver dan Ryan (2000) mengidentifikasi konservatisme sebagai perbedaan persisten antara nilai pasar dan nilai buku. Perbedaan tersebut berbeda dengan perbedaan *temporary* akibat *economic gains* dan *losses* yang diakui dalam nilai buku secara bertahap.

Hanafi dan Halim (2000) berpendapat bahwa konservatisme merupakan reaksi hati-hati atas ketidakpastian yang ada, sedemikian rupa agar ketidakpastian tersebut dan risiko yang berkaitan dalam situasi bisnis bisa dipertimbangkan dengan cukup memadai. Ketidakpastian risiko tersebut harus dicerminkan dalam laporan keuangan agar nilai prediksi dan kenetralan bisa diperbaiki.

3. Kontroversi Konservatisme Akuntansi

Prinsip konservatisme akuntansi adalah merupakan tema yang sangat menonjol dalam penelitian akuntansi, hal ini disebabkan karena prinsip ini menuai banyak kontroversi di kalangan para peneliti di bidang akuntansi keuangan. Kerangka konseptual standar akuntansi internasional (IASB) dan dewan standar akuntansi keuangan (FASB), menyimpulkan

bahwa konservatisme/kehati-hatian harus dikecualikan dari karakteristik kualitatif informasi akuntansi (Chi dan Wang, 2010). Belkaoui dan Riahi (2004) menjelaskan konservatisme adalah manifestasi dari intervensi akuntan yang dapat menimbulkan bias, kesalahan, distorsi, dan laporan yang menyesatkan, di mana pandangan saat ini mengenai konservatisme sebagai prinsip akuntansi cenderung menghilang. Hendriksen dan Van Breda (2000) menyebutkan bahaya utama konservatisme adalah metode ini sangat kasar, pengaruhnya berubah-ubah, data yang dilaporkan tidak dapat diinterpretasi, bertentangan dengan tujuan pengungkapan yang relevan, dan tidak adanya daya banding.

Pengadopsian IFRS di seluruh dunia sebagai standar untuk penyusunan laporan keuangan mengindikasikan adanya kritik terhadap prinsip konservatisme akuntansi. Hal ini dapat dibuktikan dengan digunakannya prinsip *fair value* dalam IFRS yang tidak sejalan dengan prinsip konservatisme yang menggunakan *historical cost*. Konservatisme akuntansi lebih menekankan pada reliabilitas yang bertentangan dengan prinsip *fair value* yang lebih menekankan pada relevansi. Hellman (2007) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar IFRS haruslah dapat dipahami, relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, serta tanpa bias konservatif.

Banyaknya kritik mengenai kegunaan konsep konservatisme berkaitan dengan kualitas laporan keuangan, karena penggunaan metode konservatif akan menghasilkan angka-angka yang cenderung bias dan

tidak mencerminkan realita. Monahan (1999) menyatakan bahwa semakin konservatif metode akuntansi yang digunakan, maka nilai buku ekuitas yang dilaporkan akan semakin bias (bervariasi antar waktu). Kondisi ini mendukung simpulan bahwa laporan keuangan itu sama sekali tidak berguna karena tidak dapat mencerminkan nilai perusahaan sesungguhnya. Penman dan Zang (2002) menambahkan kritikan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa praktik konservatisme dalam akuntansi menghasilkan laba yang berkualitas tinggi. Mereka berpendapat bahwa hubungan antara konservatisme dan kualitas laba dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi. Jika perubahan investasi bersifat temporer, maka dampaknya terhadap laba dan tingkat kembalian (*rate of return*) juga temporer, dan mengakibatkan laba berkualitas rendah (*tidak sustainable*).

Klein dan Marquardt dalam Juanda (2007) mengemukakan dua aspek yang menjadikan konservatisme akuntansi mengurangi kualitas laporan keuangan terutama masalah relevansi. Pertama, konservatisme melaporkan terlalu rendah baik laba maupun aktiva. Hal ini akan mempengaruhi kualitas relevansi laporan keuangan khususnya netralitas. Karena ingin mempertahankan reliabilitas, kadang perusahaan mengabaikan relevansi informasi, atau sebaliknya. Misalnya, ketika mencatat kerugian kontinjensi, mencatat biaya riset dan pengembangan. Konservatisme mendorong adanya penyimpangan karena sikap pesimistik, walaupun hal ini memang diharapkan oleh kreditor, namun akan menjadi problem ketika melakukan analisis ekuitas. Kedua,

konservatisme merupakan hasil dari penundaan pengakuan secara selektif terhadap berita baik, sementara dengan segera mengakui berita buruk. Praktik seperti ini akan mengurangi kandungan informasi laporan keuangan yang berkaitan dengan relevansi.

4. Manfaat Konservatisme Akuntansi

Di Indonesia Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK, 2009) tidak mengatur secara jelas penerapan prinsip konservatisme, namun PSAK diarahkan untuk semakin menyamai IFRS dalam beberapa tahun ke depan. Berbeda dengan IFRS, PSAK masih memberikan ruang yang lebih besar bagi para akuntan untuk membuat laporan keuangan yang konservatif. Diantaranya dengan masih digunakannya prinsip biaya historis serta pendekatan laporan keuangan dalam penghitungan pendapatan dan beban.

Prinsip konservatisme telah banyak dianut dan telah menjadi budaya para akuntan di seluruh dunia sejak abad ke-15 dan semakin populer digunakan dalam tiga dekade terakhir. Sterling dalam Belkaoui dan Riahi (2004) menyebutkan bahwa konservatisme sebagai prinsip penilaian akuntansi yang paling kuno dan mungkin paling bertahan saat ini. Tidak dimasukkannya prinsip konservatisme akuntansi dalam IFRS tidak berarti bahwa prinsip ini tidak lagi diterapkan para akuntan. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian yang terjadi di dalam perusahaan yang memicu timbulnya praktek konservatisme. Juanda (2007) menyatakan bahwa alasan yang mendasari adalah terdapat kecenderungan secara

alami bahwa manajer dan investor cenderung *over* optimistik dalam melaporkan perkembangan perusahaannya.

Givoly dan Hayn (2000) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konservatisme di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Akuntansi konservatif akan menguntungkan dalam kontrak-kontrak antara pihak-pihak dalam perusahaan maupun dengan luar perusahaan. Konservatisme dapat membatasi tindakan manajer untuk membesarkan laba serta memanfaatkan informasi yang asimetri ketika menghadapi klaim atas aktiva perusahaan.

Leftwitch El Gazzar dan Pastena dalam Juanda (2007) menemukan bahwa sebagian besar agenda keputusan FASB antara tahun 1978 sampai dengan tahun 1995 menunjukkan adanya muatan konservatif bila diterapkan, sedangkan Leuz *et al.* (1998) menemukan bahwa *historical cost* dan konservatisme digunakan di berbagai negara untuk membuat kebijakan terkait dengan dividen. Ahmed dan Duellman (2007) membuktikan bahwa konservatisme dapat berperan mengurangi konflik yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham akibat kebijakan dividen yang diterapkan perusahaan. Untuk menghindari konflik, manajemen cenderung menggunakan akuntansi yang lebih konservatif.

Beberapa penelitian mengenai eksistensi konservatisme telah dilakukan juga di Indonesia (Mayangsari dan Wilopo 2002; Wibowo 2002; Dewi, 2004). Secara umum, hasil-hasil riset tersebut menunjukkan bahwa terdapat tingkat konservatisme pelaporan keuangan di Indonesia,

walaupun masih relatif rendah dibandingkan dengan tingkat konservatisme yang terjadi di Amerika. Wibowo (2002) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme yakni karakteristik perusahaan yang meliputi *leverage*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya struktur modal yang signifikan. Dewi (2004) membuktikan bahwa tingkat konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *earnings response coefficient*. Sari (2004) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi bermanfaat untuk mengatasi konflik kepentingan di seputar kebijakan dividen. Selain itu, juga konservatisme berpengaruh terhadap penurunan biaya modal utang yang ditunjukkan dengan meningkatnya *rating* obligasi. Widya (2004) membuktikan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang cenderung konservatif dipengaruhi beberapa faktor antara lain, tingkat *leverage*, ukuran perusahaan dan tingkat kepemilikan. Haniati dan Fitriany (2010) membuktikan bahwa konservatisme akuntansi dapat mengurangi asimetri informasi yang ditimbulkan oleh manajer dan investor.

Ada beberapa argumen yang dipakai untuk mendukung konservatisme, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendriksen dan Van Breda (2000). Pertama, sikap pesimistik dianggap perlu untuk menetralkan sikap optimistik berlebihan yang ada pada para manajer dan pemilik. Para pengusaha mempunyai kecenderungan bersikap optimistik tentang perusahaan dan hal ini menimbulkan anggapan bahwa mereka juga akan menerapkan sikap tersebut dalam memilih prinsip dan metode

akuntansi untuk melaporkan keuangan. Adanya desakan dari pihak kreditor, sejak abad ke-19 para akuntan selalu menunjukkan sikap konservatif dalam penyusunan laporan keuangannya. Sikap ini terus dianut dan memberikan warna dalam praktik akuntansi masa kini. Kedua, *overstatement* laba dan aset jauh lebih berbahaya daripada *understatement*. Adanya anggapan bahwa konsekuensi karena kesalahan memperkirakan keuntungan berakibat lebih serius daripada konsekuensi karena kesalahan memperkirakan kerugian atau kebangkrutan. Oleh karenanya, para akuntan memerlukan verifikasi yang lebih tinggi untuk mengakui pendapatan yang mungkin timbul dibanding mengakui biaya yang mungkin timbul.

5. Pengukuran Konservatisme

Watts (2003) menjelaskan bahwa pengukuran konservatisme akuntansi dibagi menjadi tiga pengukuran, yaitu *earning/stock return relation measure*, *earning/accrual measures*, dan *net asset measure*.

a. *Earning/stock return relation measure*

Stock market price berusaha untuk merefleksikan perubahan nilai aset pada saat terjadinya perubahan baik perubahan atas rugi maupun laba, akan dilaporkan sesuai dengan waktunya. Salah satu pengukuran yang menggunakan pendekatan ini adalah model Basu. Basu (1997) menyatakan bahwa konservatisme menyebabkan kejadian-kejadian yang merupakan kabar buruk atau kabar baik terefleksi dalam laba yang tidak sama (asimetri waktu pengakuan). Hal ini disebabkan karena kejadian

yang diperkirakan akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan harus segera diakui sehingga mengakibatkan *bad news* lebih cepat terefleksi dalam laba dibandingkan *good news*.

b. *Earning/accrual measures*

Ukuran konservatisme *earning/accrual* adalah selisih antara *net income* dan *cash flow*. *Net income* yang digunakan adalah *net income* sebelum depresiasi dan amortisasi, sedangkan *cash flow* yang digunakan adalah *cash flow* operasional. Givoly dan Hayn (2000) melihat kecenderungan dari akun akrual selama beberapa tahun. Apabila terjadi akrual negatif (*net income* lebih kecil daripada *cash flow* operasional) yang konsisten selama beberapa tahun, maka merupakan indikasi diterapkannya konservatisme.

Model *Earning/accrual measures* juga digunakan oleh Zhang (2002). Zhang mengukur konservatisme dengan membagi akrual non operasi dengan total aset. Akrual non operasi memperlihatkan pencatatan kejadian buruk yang terjadi dalam perusahaan, contohnya biaya restrukturisasi dan penghapusan aset. Dalam penelitiannya Zhang mengalikan hasil pengukuran konservatisme dengan -1 yang bertujuan untuk mempermudah analisa. Semakin tinggi nilai positif konservatisme menunjukkan penerapan konservatisme yang semakin tinggi juga.

c. *Net asset measure*

Ukuran ketiga yang digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme dalam laporan keuangan adalah nilai aktiva yang

understatement dan kewajiban yang *overstatement*. Salah satu model pengukurannya adalah proksi pengukuran yang digunakan oleh Beaver dan Ryan (2000) yaitu dengan menggunakan *market to book ratio* yang mencerminkan nilai pasar relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio yang bernilai lebih dari 1, mengindikasikan penerapan akuntansi yang konservatif karena perusahaan mencatat nilai perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya

6. Asimetri Informasi

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak internal perusahaan seperti manajer, karyawan, serikat buruh, dan lainnya. Pihak yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat). Para pengguna internal (para manajemen) mengetahui peristiwa yang terjadi dalam perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang berada di luar perusahaan kurang mengetahui informasi tersebut. Kurangnya informasi akan menyulitkan pihak eksternal terutama pemegang saham dan kreditor dalam menilai kualitas perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan investasi.

Salah satu kendala yang akan muncul antara *agent* dan *principal* adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent*

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya *moral hazard* berupa usaha manajemen untuk melakukan *earnings management* (Rahmawati *et al.*, 2007). Atiqah (2008) menjelaskan asimetri informasi sebagai situasi yang terbentuk karena pemegang saham (*principal*) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja manajer (*agent*) sehingga *principal* tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-usaha *agent* terhadap hasil-hasil perusahaan yang sesungguhnya. Asimetri informasi dapat diatasi dengan mengharuskan manajemen melakukan pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas kondisi perusahaan dalam laporan keuangan. Di samping itu, dapat pula dilakukan pengawasan (*monitoring*) terhadap tindakan manajemen melalui auditor independen.

Scott (2003) menyatakan bahwa asimetri informasi dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

a. *Adverse selection*

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana satu pihak atau lebih melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insider*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para pemegang saham. Para pemegang saham atau prinsipal mungkin tidak mengakses semua

informasi yang disediakan agen, sehingga tidak dapat mengawasi tindakan manajer apakah mereka sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan kontrak atau tidak. Kemungkinan lainnya adalah manajer dengan sengaja menyembunyikan atau memanipulasi informasi-informasi penting yang akan diberikan oleh prinsipal, sehingga prinsipal sulit untuk melakukan keputusan investasi.

b. *Moral hazard*

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi yaitu suatu pihak atau lebih melangsungkan transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi tersebut, sedangkan pihak lainnya tidak. Hal ini dapat mengakibatkan pemegang saham sebagai prinsipal tidak mengetahui tindakan manajer sebagai agen yang mungkin melakukan tindakan di luar kontrak kerja yang tidak sesuai dengan etika dan norma yang berlaku atau tindakan manajer yang mungkin bekerja kurang optimal bagi tercapainya tujuan perusahaan.

Schiff dan Lewin (1970) dalam Ujiyanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa *agent* berada pada posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui

principal. Sehingga dalam kondisi semacam ini *principal* seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan.

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, *agent* juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK, 2009). Dengan adanya kondisi yang asimetri, maka *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

7. Bid-Ask Spread

Jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain di pasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui *broker/dealer* yang memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. *Broker/dealer* inilah yang siap untuk menjual pada investor untuk harga *ask* jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka *broker/dealer* ini yang akan membeli sekuritas dengan harga *bid*. Perbedaan antara harga *bid* dan harga *ask* inilah yang disebut *spread*. Jadi *bid-ask spread* merupakan selisih harga beli tertinggi bagi *broker/dealer* bersedia untuk

membeli suatu saham dan harga jual di mana *broker/dealer* bersedia untuk menjual saham tersebut.

Penggunaan *bid-ask spread* sebagai proksi dari asimetri informasi menurut Komalasari (2001) dikarenakan dalam mekanisme pasar modal pelaku pasar modal juga menghadapi masalah agensi. Partisipan pasar saling berinteraksi guna mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya. Aktivitas yang mereka lakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara langsung (laporan publik), maupun tidak langsung (*insider trading*). *Dealers* atau *market-makers* memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan *informed traders*. Hal inilah yang menimbulkan *adverse selection* yang mendorong *dealers* untuk menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan *spread*-nya terhadap pedagang likuid. Jadi dapat dikatakan bahwa asimetri informasi yang terjadi antara *dealer* dan pedagang terinformasi tercermin pada *spread* yang ditentukannya (Komalasari, 2001).

Pembahasan lebih lanjut mengenai *spread* dikemukakan oleh Cohen *et al.* (1981) menekankan bahwa riset mengenai kos transaksi/kos kesegeraan (*immediacy cost*) harus membedakan antara *spread dealer* dan *spread pasar*. Ia menjelaskan bahwa *spread dealer* untuk suatu saham merupakan perbedaan harga *bid* dan *ask* yang ditentukan oleh *dealer* secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkan *spread pasar* untuk suatu saham merupakan

perbedaan harga *bid* tertinggi dan *ask* terendah di antara beberapa *dealer* yang sama-sama melakukan transaksi untuk saham tersebut. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka *spread* pasar dapat lebih kecil dibandingkan dengan *spread dealer*.

Literatur mikrostruktur mengenai *bid-ask spread* menyatakan bahwa terdapat suatu komponen *spread* yang turut memberikan kontribusi terhadap kerugian yang dialami *dealer* ketika bertransaksi dengan pedagang terinformasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kos pemrosesan pesanan (*order processing cost*), terdiri atas biaya yang dibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannya mempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasi untuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas guna menyelesaikan transaksi.
- b. Kos penyimpanan persediaan (*inventory holding cost*) yaitu kos yang ditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham agar dapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
- c. *Adverse selection component*, menggambarkan suatu upah (*reward*) yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suatu risiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi superior. Komponen ini terkait erat dengan arus informasi di pasar modal.

Berkaitan dengan *bid-ask spread*, fokus perhatian akuntan adalah pada komponen *adverse selection* karena berhubungan dengan

penyediaan informasi ke pasar modal. Cohen *et al.* (1981) menekankan bahwa riset mengenai kos transaksi/kos kesegeraan (*immediacy cost*) harus membedakan antara *spread dealer* dan *spread* pasar. Ia menjelaskan bahwa *spread dealer* untuk suatu saham merupakan perbedaan harga *bid* dan *ask* yang ditentukan oleh *dealer* secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkan *spread* pasar untuk suatu saham merupakan perbedaan harga *bid* tertinggi dan *ask* terendah di antara beberapa *dealer* yang sama-sama melakukan transaksi untuk saham tersebut. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka *spread* pasar dapat lebih kecil dibandingkan dengan *spread dealer*.

8. Corporate Governance

a. Pengertian corporate governance

Pengertian *corporate governance* berdasarkan surat keputusan menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN adalah: "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika".

Pengertian tersebut menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders*. Tujuan jangka panjang penerapan *good corporate governance* adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

Dewasa ini masih terdapat berbagai definisi tentang *corporate governance* yang telah dikemukakan di antaranya adalah Cadbury *Committee* (1992) menjelaskan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sementara *Forum of Corporate Governance for Indonesia* atau FCGI (2001) mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Juanda (2009) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip antara lain *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (direksi dan komisaris), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta *stakeholders* lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tujuannya adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders* dalam perusahaan. Adanya nilai tambah bagi *stakeholders* ini akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan yang bersangkutan. Shleiver dan Vishny (1997) menyatakan *corporate governance* merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas (*outside investors/minority shareholders*) dari ekspropriasi yang dilakukan oleh

para manajer dan pemegang saham pengendali (*insider*) dengan penekanan pada mekanisme legal. Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal (*outside investors*), baik pemegang saham maupun kreditor, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

Menurut FCGI (2001) bahwa ada empat unsur penting dalam *corporate governance* yang merupakan prinsip-prinsip dalam *good corporate governance*, yaitu sebagai berikut.

1. Keadilan (*fairness*)

Perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

2. Transparansi (*transparency*)

Adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Akuntabilitas (*accountability*)

Peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris (dalam *two tiers system*). Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

b. *Corporate governance* dan perspektif agensi

Perspektif hubungan agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Inti dari hubungan agensi adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (di pihak *principal*/investor) dan pengendalian (di pihak *agent*/manajer). Investor memiliki harapan bahwa

manajer akan menghasilkan *returns* dari uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi apa sajakah yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana para investor, dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor. Secara ideal, investor dan manajer sebaiknya menandatangani kontrak yang lengkap/komplit, yang menspesifikasikan secara tepat apa saja yang akan dilakukan oleh manajer di segala kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana laba perusahaan akan dialokasikan. Namun demikian, sebagian besar faktor-faktor kontinjensi sulit untuk dilihat/diramal sebelumnya, sehingga kontrak yang lengkap sulit untuk diwujudkan. Dengan demikian, investor diharuskan untuk memberikan hak pengendalian residual (*residual control right*) kepada manajer, yaitu hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat dikontrak (Darmawati *et al.*, 2004).

Berkaitan dengan masalah agensi, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori agensi, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan

berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997).

Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs*, yang menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya *enforcement*-nya. *Agency costs* ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham; biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal; serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk *bonding expenditures* yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

c. Mekanisme *corporate governance*

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering di pakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik agensi, yaitu kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit (Juanda, 2009).

1. Kepemilikan manajerial

Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham yang besar seharusnya mempunyai konflik agensi yang rendah dan biaya agensi yang rendah pula. Konflik agensi yang rendah dapat direfleksikan dari tingginya tingkat perputaran aktiva perusahaan dan rendahnya beban operasi terhadap penjualan (Faizal, 2004).

Masalah agensi tidak timbul jika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tidak dijalankan secara terpisah. Pemilik (pemegang saham) bertujuan untuk memaksimalkan kekayaannya dengan melihat nilai sekarang dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi perusahaan, sedangkan manajer bertujuan pada peningkatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Kepemilikan manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak

buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer mempunyai hak *voting* yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) membentuk suatu teori yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dengan cara memanipulasi laba.

Struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kontrol yang mereka miliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006)

2. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan institusional merupakan pemegang saham terbesar sehingga merupakan sarana untuk memonitor manajemen. Gideon (2005) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak

manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manipulasi laba. Investor institusional dapat meminta manajemen perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dalam laporan tahunannya untuk transparansi kepada *stakeholders* untuk memperoleh legitimasi dan menaikkan nilai perusahaan melalui mekanisme pasar modal sehingga mempengaruhi harga saham perusahaan.

Fala (2007) menyatakan bahwa investor institusional mempunyai investasi ekuitas yang cukup besar, sehingga investor institusional terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer lebih ketat. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat mengurangi insentif manajemen yang mungkin melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan yang mementingkan kepentingan manajemen sendiri. Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian, proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004).

Ahmed dan Duellman (2007) mengemukakan kepemilikan institusional dapat dilihat sebagai alternatif dari mekanisme *corporate*

governance, di mana dengan adanya kepemilikan institusional yang tinggi maka pemegang saham institusional dapat menggantikan atau memperkuat fungsi *monitoring* dari dewan dalam perusahaan, sehingga kepentingan para pemegang saham dapat terlindungi dan secara tidak langsung dapat menuntut adanya informasi yang transparan dari pihak manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional ini, maka semakin besar pula *monitoring* yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya informasi yang transparan.

3. Komisaris independen

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*). Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, menjaga “*fairness*”, mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan kepentingan para *stakeholders* lainnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya, komisaris

independen sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas untuk memonitoring jalannya operasi perusahaan.

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. Menurut Zehnder dalam FCGI (2001) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (FCGI, 2001). Komisaris independen yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Wardhani, 2008).

4. Komite audit independen

Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Secara umum, komite audit dibentuk

untuk membantu dewan komisaris (dalam *two tiers system*) untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit, baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Oleh karenanya, untuk mempertahankan independensi, komite audit beranggotakan komisaris independen dan pihak-pihak luar perusahaan yang terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (FCGI, 2001). Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan telah diatur oleh BAPEPAM melalui Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai pembentukan dan

pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa setiap emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit dan memiliki pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*). Komite audit tersebut terdiri atas sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya dua orang anggota lainnya yang berasal dari luar emiten dan komite audit tersebut bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Komite audit merupakan unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga hal ini dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya.

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga, konflik agensi yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka proses berpikir penelitian ini didasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka (ringkasan penelitian lampiran 1). Kerangka proses berpikir merupakan bagan komprehensif yang menunjukkan gambaran mengenai penyusunan tesis berdasarkan pemaparan studi teoretik dan studi empirik. Studi teoritik dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Ketika melakukan studi teoritik terjadi proses berpikir deduktif, yaitu proses berpikir dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Studi empirik dilakukan dengan cara mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam studi ini. Ketika melakukan studi empirik terjadi proses berpikir induktif, yaitu proses berpikir dari yang bersifat khusus ke yang bersifat umum. Berdasarkan studi teoritik yang bersifat deduktif dan studi empirik yang bersifat induktif ditemukan variabel-variabel penelitian yang selanjutnya hubungan antara variabel-variabel penelitian tersebut di tentukan sehingga menghasilkan hipotesis. Dengan demikian, hipotesis merupakan hasil interaksi dari studi teoritik yang bersifat deduktif dengan studi empirik yang bersifat induktif.

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang harus diuji kebenarannya dengan menggunakan alat bantu uji statistik. Pengujian secara statistik ini akan memberikan informasi tentang pembuktian apakah hipotesis tersebut mendukung atau tidak mendukung

studi teoretik atau studi empirik yang digunakan untuk menghasilkan hipotesis dalam penelitian ini.

Hasil uji hipotesis secara statistik akan diinterpretasikan dalam pembahasan yang akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi dari tesis ini. Semua temuan dalam penelitian ini dapat memberikan umpan balik terhadap studi teoretik dan studi empirik. Temuan studi teoretik memberi umpan balik dapat berupa mendukung, mengembangkan, membantah teori sebelumnya, atau menghasilkan teori baru yang berguna untuk penelitian lanjutan, sedangkan temuan studi empirik memberi umpan balik yang dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan atau menyempurnakan kebijakan yang telah ada.

Selanjutnya berdasarkan kerangka proses berpikir, maka disusun kerangka konseptual yang menggambarkan variabel-variabel penelitian dan pengaruh antar variabel. Pengaruh antar variabel menunjukkan pengaruh antara variabel laten dengan variabel laten lainnya dan pengaruh antara variabel laten dengan variabel terukur atau indikatornya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

STUDI TEORETIS

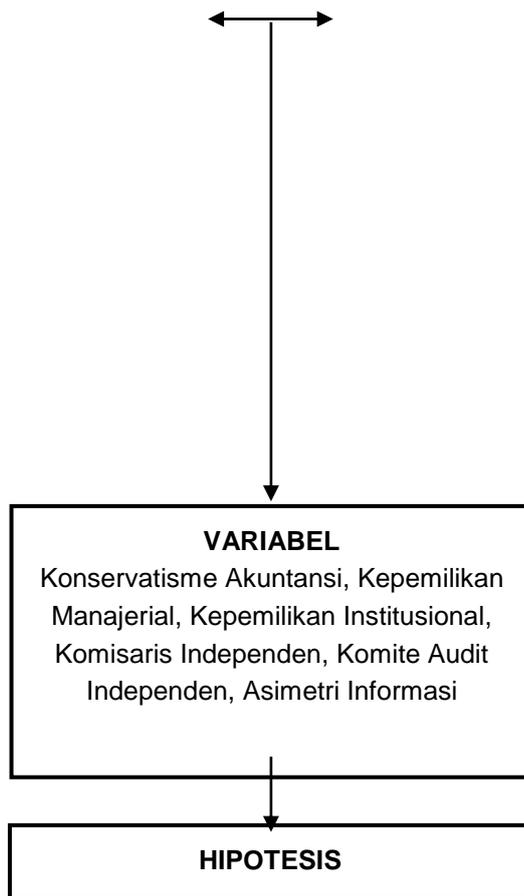
Teori Agensi (*Agency Theory*)
Jensen dan Meckling (1976)

Bid Ask Spread
Almutairi *et al.* (2009), Cohen *et al.*

STUDI EMPIRIS

**Hubungan Konservatisme
Akuntansi dengan Asimetri
Informasi.**

Chi dan Wang (2010), Haniati dan
Fitriany (2010), Lafond dan Watts
(2006), Givoly dan Hayn (2000),



Gambar 1. Kerangka konseptual

C. Hipotesis

1. Konservatisme akuntansi dan asimetri informasi

Asimetri informasi yang muncul antara manajer dengan investor memungkinkan manajer menggunakan *private information* yang mereka miliki untuk memindahkan kekayaan para investor ke diri mereka dengan jalan membesar-besarkan (*overstatement*) kinerja keuangan dalam laporan keuangan sehingga harga saham perusahaan juga ikut naik selama mereka mengelola perusahaan (Lafond dan Watts, 2006). Cara lain yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk mengambil kekayaan pemegang saham adalah melalui biaya agensi. Biaya agensi adalah biaya yang diberikan kepada manajemen untuk mengelola perusahaan sehingga dapat memenuhi keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan biaya agensi dan harga saham, maka investor akan membayar lebih, namun tidak mendapatkan keuntungan sesuai harapan. Keadaan seperti ini sangat merugikan investor.

Berhubungan dengan kecenderungan manajer untuk melakukan manipulasi laporan keuangan, maka Lafond dan Watts (2006) memberikan pendapat bahwa konservatisme merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk melakukan manipulasi dan *overstatement* laporan keuangan, terutama mengenai kinerja keuangan sehingga dapat meningkatkan arus kas dan nilai perusahaan. Konservatisme mengurangi asimetri informasi dan manipulasi laporan keuangan dengan cara membatasi penyajian laba yang tidak diverifikasi, serta memastikan semua kerugian telah masuk dalam laporan keuangan. Selain itu,

konservatisme juga melakukan verifikasi terhadap *net asset* yang terdapat di neraca untuk mencegah manajemen membesar-besarkan aset.

Konservatisme dapat diukur dengan berbagai cara yaitu *earning/stock return relation measure* (contoh: model Basu, 1997), *earning/accrual measures* (contoh: model Givoly dan Hayn 2000, dan model Zhang, 2002), *net asset measure* (contoh: model Beaver dan Ryan, 2000). Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa semakin tinggi tingkat konservatisme dalam laporan keuangan, maka semakin rendah asimetri informasi yang muncul antara manajer dengan investor. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa konservatisme dapat mengatasi masalah yang timbul akibat asimetri informasi, di antaranya *overstatement* laporan keuangan dan munculnya *agency cost*. Maka, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H1: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap asimetri informasi

2. Interaksi *corporate governance* terhadap konservatisme dan asimetri informasi

a. Kepemilikan manajerial

Penggunaan konsep konservatisme berkaitan dengan struktur kepemilikan manajerial pada sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak eksternal. Besar kecilnya struktur kepemilikan saham dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen maka semakin kuat motivasi mereka untuk bekerja dalam meningkatkan nilai saham perusahaan.

Manajer cenderung menjadi sumber informasi mengenai kinerja perusahaan saat ini, ataupun masa yang akan datang. Keterbatasan pandangan serta keterbatasan tanggung jawab manajer menyebabkan timbulnya masalah agensi antara manajer dan pemegang saham. Keterbatasan tersebut memberikan dorongan bagi manajer untuk melaporkan laba dan aliran kas yang *overstated*, sehingga menciptakan biaya agensi. Biaya agensi timbul karena usaha manajer untuk memindahkan kekayaan perusahaan pada dirinya dan mengabaikan peran utamanya, yaitu mengatur perusahaan secara efektif, serta menciptakan nilai bagi pemegang saham (Lafond dan Roychowdhury, 2007). Hasil penelitian Lafond dan Roychowdhury menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan konservatisme akuntansi. Semakin rendah kepemilikan manajerial, maka permintaan ditetapkannya akuntansi konservatis semakin tinggi. Oleh karena itu, konservatisme muncul sebagai suatu mekanisme potensial yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah agensi antara manajer dan pemegang saham karena adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Mereka juga menghipotesiskan bahwa dengan semakin kecil kepemilikan manajerial maka permasalahan agensi yang

muncul akan semakin besar sehingga permintaan atas laporan yang bersifat konservatif akan semakin meningkat.

Suaryana (2008) menjelaskan bahwa keputusan metode akuntansi yang digunakan tidak lepas dari struktur kepemilikan saham. Apabila struktur kepemilikan saham manajer lebih rendah dari kepemilikan saham eksternal, maka metode akuntansi yang digunakan akan cenderung lebih optimis atau kurang konservatif. Manajer ingin agar kinerja yang mereka hasilkan dinilai baik oleh pemegang saham yang mempunyai kepemilikan saham yang lebih besar darinya, sehingga pemegang saham percaya bahwa dividen yang akan mereka dapatkan juga tinggi dilihat dari laba yang tinggi pula. Lebih lanjut, umumnya target suatu perusahaan diorientasikan dengan laba, maka semakin tinggi laba, kinerja manajemen akan dinilai semakin baik sehingga manajer mendapat bonus yang lebih banyak (dengan asumsi terdapat perjanjian *bonus plan*). Hal tersebut yang mendorong manajer melaporkan laba lebih besar. Sebaliknya, bila kepemilikan manajerial lebih tinggi dibandingkan pihak eksternal, maka perusahaan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang konservatif. Rasa memiliki manajer terhadap perusahaan membuat mereka tidak ingin melaporkan laba secara berlebihan. Karena laba yang dinilai tidak berlebihan, maka akan terdapat cadangan dana yang tersembunyi yang dapat digunakan perusahaan untuk memperbesar perusahaan dengan meningkatkan jumlah investasi (Mayangsari dan Wilopo, 2002). Dengan adanya peningkatan nilai perusahaan tersebut,

diharapkan investor maupun calon investor dapat menilai perusahaan secara positif sehingga tertarik untuk menanamkan investasi baru.

Kepemilikan saham oleh manajerial sebagai mekanisme *corporate governance* berfungsi untuk meminimalkan permasalahan dalam teori agensi akibat dari adanya asimetri informasi. Fungsi ini dipandang mampu memoderasi hubungan negatif antara konservatisme akuntansi dan asimetri informasi. Hal tersebut disebabkan karena manajer dengan kepemilikan saham yang besar cenderung untuk menerapkan akuntansi konservatif dalam penyajian laporan keuangan yang dapat mengurangi asimetri informasi dibandingkan dengan manajer dengan kepemilikan saham yang kecil. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2a: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi

b. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain). Institusi biasanya memiliki sumber daya investasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham biasa, sehingga mereka dapat menguasai mayoritas saham perusahaan. Oleh karena institusi menguasai mayoritas saham perusahaan, maka pihak institusional ini dapat melakukan pengawasan

terhadap kebijakan manajemen secara lebih luas dibandingkan dengan pemegang saham lainnya.

Adanya kepemilikan institusional yang tinggi, maka pemegang saham institusional dapat menggantikan atau memperkuat fungsi monitoring dari dewan dalam perusahaan (Ahmed dan Duellman, 2007). Semakin besar kepemilikan institusional, maka semakin besar pula monitoring yang dilakukan terhadap pihak manajemen perusahaan dan semakin besar pula tuntutan akan adanya informasi yang transparan. Oleh karena itu, dengan adanya investor institusional ini, maka dapat mendorong pihak manajemen perusahaan untuk menetapkan prinsip akuntansi yang konservatif.

Cornett *et al.* (2006), menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa dengan peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan peranan kepemilikan manajerial dalam rangka meminimumkan *agency cost* dalam perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan persentase kepemilikan institusional dapat menurunkan persentase kepemilikan manajerial. Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajemen diawasi secara optimal, sehingga manajemen menghindari perilaku yang merugikan prinsipal.

Peneliti lain mengungkapkan pandangan yang berbeda tentang kepemilikan institusional yang tinggi. Claessens, *et al.* (2000) menemukan bahwa semakin besar hak kontrol, semakin rendah nilai perusahaan. Hal yang sama juga ditemukan oleh La Porta *et al.* (2002) bahwa semakin tinggi konsentrasi kepemilikan maka akan semakin rendah nilai perusahaan. Institusi dengan kepemilikan saham yang tinggi cenderung menggunakan hak kontrol yang dimilikinya untuk mendapatkan manfaat *private* berupa pembayaran deviden yang tinggi (Shleifer dan Vishny, 1997). Hal ini sejalan dengan pandangan Siregar dan Utama (2007) bahwa pemegang saham besar hampir sepenuhnya dapat mengendalikan perusahaan untuk memperoleh manfaat *private* atas kontrol terhadap pemegang saham minoritas. Keadaan seperti ini akan membuat manajemen akan lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih liberal untuk mencapai laba yang tinggi.

Karena *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat mengendalikan (mengatur) perilaku *stakeholders* dengan demikian *corporate governance* dapat mempengaruhi pilihan manajemen dalam menerapkan prinsip akuntansi yang terkait dengan prinsip konservatisme. Wibowo (2002) menyatakan bahwa pilihan terhadap suatu metoda akuntansi yang terkait dengan prinsip konservatisme dipengaruhi juga oleh struktur kepemilikan sebagai salah satu mekanisme *corporate governance*. Penelitian Widya (2004) menemukan bahwa struktur kepemilikan mempengaruhi pemilihan strategi akuntansi konservatif

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut .

H2b: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi

c. Komisaris independen.

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa komposisi dewan komisaris yang terdiri atas anggota yang berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi tindakan manajer untuk melakukan kecurangan dengan cara membesar-besarkan laba dan memanipulasi laba (Gideon, 2005).

Menurut Zehnder dikutip dalam *booklet* FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen, maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran yang utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Indonesia merupakan negara yang menggunakan konsep *two tiers*, di mana dewan terdiri dari dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang, sedangkan, peran dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu, dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi, sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Wardhani, 2006).

Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of*

directors yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (Ahmed dan Duellman, 2007).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2c: Komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi

d. Komite audit independen

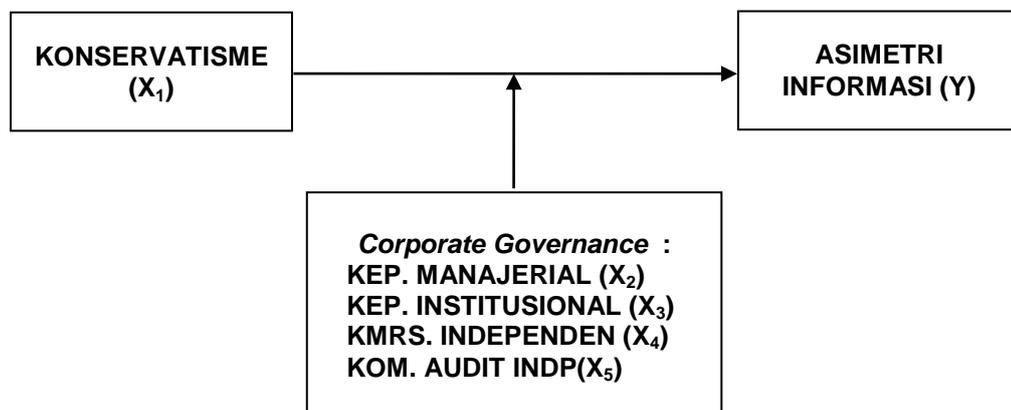
Komite audit independen bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Adanya komite audit independen dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang

akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, keberadaan komite audit independen mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit independen dapat meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme (Wardhani, 2006). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

H2d: Komite audit independen berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan asimetri informasi

D. Model Penelitian

Berdasarkan atas pengembangan hipotesis yang telah dikemukakan di atas maka disusunlah model penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. Model penelitian